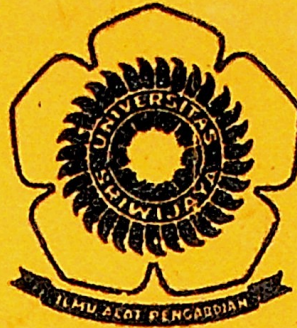


**IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**



**Skripsi Oleh:**

**FRIESDA ROTUA RUMONDANG**

**NIM 01061003032**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**Tahun 2010**



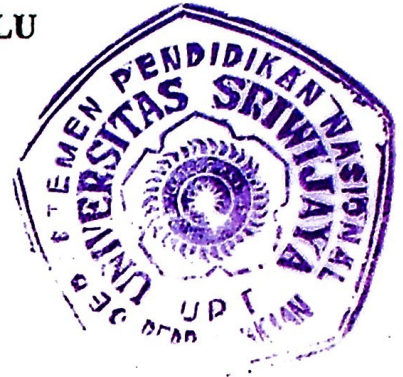
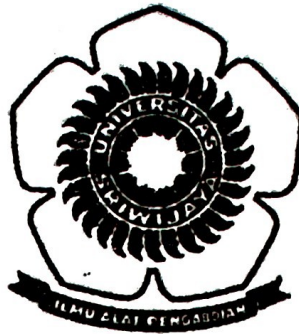
S  
657.307

Fri  
i

2010

**IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH KOTA BENGKULU**



**Skripsi Oleh:**

**FRIESDA ROTUA RUMONDANG**

**NIM 01061003032**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**INDERALAYA**

**Tahun 2010**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN**

**NAMA** : FRIESDA ROTUA RUMON  
**NIM** : 01061003032  
**JURUSAN** : AKUNTANSI  
**MATA KULIAH** : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN  
PEMERINTAH KOTA BENDAHARA

**PEMBIMBING SKRIPSI**

**TANGGAL PERSETUJUAN**

**DOSEN**

**Tanggal** Agustus 2010

**Ketua :**

M.Nasution  
NIP. 19530101198001001

**Tanggal** Agustus 2010

**Anggota:**

Arista  
NIP. 19530101198001001

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : FRIESDA ROTUA RUMONDANG  
NIM : 01061003032  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

**PEMBIMBING SKRIPSI**

**TANGGAL PERSETUJUAN**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Tanggal Agustus 2010**

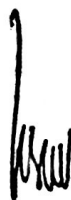
**Ketua :**



**M.Nasai, SE, MAFIS, Ak  
NIP. 196706081992031004**

**Tanggal Agustus 2010**

**Anggota:**



**Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak  
NIP. 197303171997031002**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA**

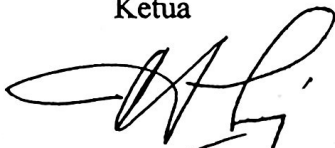
**TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**NAMA : FRIESDA ROTUA RUMONDANG  
NIM : 01061003032  
JURUSAN : AKUNTANSI  
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 4 Agustus 2010 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 4 Agustus 2010**

**Ketua**

  
**M. Nasai, SE, MAFIS, Ak**  
NIP. 196706081992031004

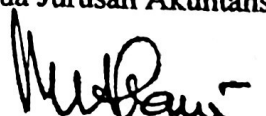
**Anggota**

  
**Sulaiman SM, SE, M.B.A., Ak**  
NIP. 196301201992031002

**Anggota**

  
**Dewi Rina K, SE, M.M., Ak**  
NIP. 196209131994032001

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**Drs. Burhanuddin, M. Acc, Ak**  
NIP 195808281988101001

## **MOTTO**

- Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. (Lukas 10:27)
- Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. (Mazmur 28 :7)
- It's so simple to be wise. Just think of something stupid to say and say the opposite. (Sam Levenson)
- Have a heart that never hardens, a temper that never tires, a touch that never hurts. (Charles Dickens)
- The first and greatest victory is to conquer yourself; to be conquered by yourself is of all things most shameful and vile. (Plato)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku terkasih
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “**Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu**”. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum, Bab IV Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data primer Pemerintah Kota Bengkulu yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini WDP adalah karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, yaitu di mana Pemerintah Kota Bengkulu belum mempunyai SDM dengan latar belakang yang sesuai dalam spesifikasi tugas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan; pengelolaan atas Aset daerah yang kurang baik; dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah yang masih lemah atas pengelolaan keuangan daerah, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesalahan, ketidaktertiban, penyimpangan, penyelewengan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja keuangan pemda dan menjadi acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya mengenai implementasi sistem pelaporan keuangan daerah.

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi.

**Penulis**

**Friesda Rotua Rumondang**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu”**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurizal AK, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Muhammad Nasai, SE, MAFIS, Ak, dan Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak, kedua Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Sulaiman SM, SE, M.B.A., Ak dan Dewi Rina K, SE, M.M, Ak, kedua Dosen Penguji Ujian Komprehensif
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Kepala dan staf pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu
8. Kedua orang tuaku yang tercinta, Drs H. Manik dan Roselina S.Pd yang tak pernah lelah memberi dukungan sepenuhnya, baik doa, moril maupun pendanaan. Untuk saudara dan saudariku yang terkasih, Uly Eva Magdalena, Hosianna Agnessa, Benny Alex Aries Simorangkir yang telah memberi semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah, serta selalu siap membantuku bila menghadapi kesulitan dan membutuhkan masukan.
9. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
10. Morry Wandy Siallagan, abang, teman dan juga sahabat yang telah menemaniku selama tiga tahun terakhir menimba ilmu di kota ini. Yang selalu bersedia direpotkan, tak pernah bosan mendengar semua keluhanku,



dan punya seribu satu cara untuk membuatku kembali bersemangat dan tersenyum. Terima kasih untuk semua kesetiaan itu.

11. Teman-teman angkatan 2006 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Yuni, Wulan, Ike, Yuyun, Alma, Dina, Aya, Anyit, Vera Kiting, Reni, Dewi, Dini, Norma, Iren dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Teman-teman yang selama empat tahun ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan saling memberi semangat. Kalian selalu di hatiku.
12. Teman-teman kos: Cici, Tuty, Mba Tuty, Alit, Sufi, Falina, Arie. Terima kasih untuk semua bantuan dan “pinjaman-pinjaman” yang diberikan selama empat tahun di Tomemasa. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan kekhilafan dalam selama hidup bertetangga.
13. Sahabat-sahabatku semenjak SMA, Juliana Putri Utami, Arsy Aprianty, Rebi Novrida Anton, dan Inne Widhia. Bahagia memiliki sahabat seperti kalian, walau berjauhan tapi tetap mampu menjalin tali silaturahmi. Semoga suatu saat kita bisa berkumpul, bercanda tawa bersama-sama lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua. Amin.

**Penulis**

**Friesda Rotua Rumondang**

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

3.1. Gambaran Umum Kota Bengkulu .....	29
3.1.1 Sejarah Singkat .....	29
3.1.2 Letak Geografis.....	30
3.1.3 Luas Wilayah .....	30
3.1.4 Batas Wilayah .....	31
3.1.5 Iklim dan Topografi .....	31
3.1.5.1 Iklim .....	31
3.1.5.2 Topografi .....	31
3.1.6 Wilayah Administrasi .....	32
3.1.7 Kependudukan .....	33
3.2 Organisasi Pemerintah Kota Bengkulu .....	33
3.3 Visi dan Misi Kota Bengkulu .....	35
3.3.1 Visi Kota Bengkulu .....	35
3.3.2 Misi Kota Bengkulu .....	35
3.4 Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kota Bengkulu .....	36
3.5 Kebijakan .....	37
3.6 Prosedur Akuntansi .....	37
3.7 Pelaporan Keuangan .....	40
3.8 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bengkulu .....	43
3.8.1 Menu-Menu Pokok .....	43
3.8.2 Output .....	46
3.8.3 Spesifikasi .....	47
3.9 Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 2008 .....	48
3.9.1 Neraca Komparatif .....	48
3.9.2 Laporan Realisasi Anggaran .....	50
3.9.3 Laporan Arus Kas .....	52

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1. Kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 .....	55
4.1.1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern .....	56
4.1.2. Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan terhadap Perundang-Undangan .....	63
4.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu Memperoleh Opini Audit WDP dalam Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 .....	74
4.3. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Keberhasilan dalam Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu .....	79

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

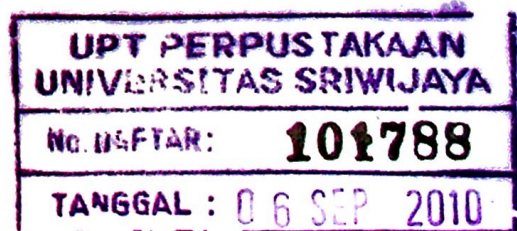
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
-----------------------------	----



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metodologi Penelitian.....	6
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.5.2 Lokasi Penelitian .....	6
1.5.3 Data dan Metode Pengambilan Data .....	6
1.5.3.1 Jenis Data .....	6
1.5.3.2 Sumber Data .....	7
1.5.3.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5.4 Teknik Analisis Data .....	8
1.6. Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Akuntansi Pemerintahan.....	10
2.2. Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik .....	12
2.3. Akuntansi Keuangan Daerah .....	13
2.3.1 Sistem Akuntansi .....	13
2.3.2 Pengakuan Pendapatan dan Belanja .....	14
2.4. Komponen Laporan Keuangan Daerah .....	15
2.5. Audit Sektor Publik Menurut Peraturan Perundangan .....	17
2.6. Audit Sektor Publik dan <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
2.7. Penerapan Pengelolaan Keuangan di Daerah .....	23
2.8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .....	24
2.9. Pengelolaan Aset Daerah .....	26
2.10. Sumber Daya Manusia .....	27
2.11. Manajemen Sumber Daya Manusia .....	28



## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan Di Kota Bengkulu Tahun 2008 .....	45
Tabel 3.2 Neraca Komparatif Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007 & 2008 .....	48
Tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Bengkulu TA 2007 & 2008 .	50
Tabel 3.4 Laporan Arus kas Pemkot Bengkulu TA 2007 & 2008 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Kota Bengkulu .....	45
Gambar 3.2 Prosedur Akuntansi .....	39
Gambar 3.3 Prosedur Pelaporan Pemda .....	42
Gambar 3.4 Tampilan Awal Anggaran SKPKD .....	43
Gambar 3.5 Tampilan Awal BUD SKPKD .....	44
Gambar 3.6 Tampilan Awal Pembukuan SKPKD .....	44
Gambar 3.7 Tampilan Awal Anggaran SKPD .....	45
Gambar 3.8 Tampilan Awal Penatausahaan keuangan SKPD .....	45
Gambar 3.9 Tampilan Awal Perbendaharaan SKPD .....	46

# **Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu**

**Friesda Rotua Rumondang**

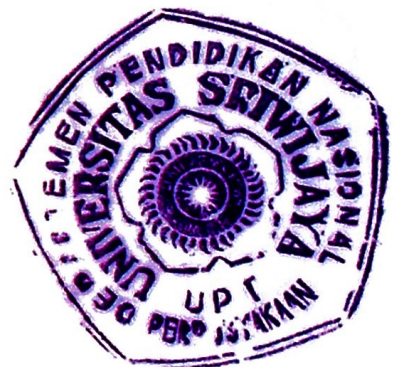
## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya untuk Tahun Anggaran (TA) 2008.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini WDP adalah karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, yaitu di mana Pemerintah Kota Bengkulu belum mempunyai SDM dengan latar belakang yang sesuai dalam spesifikasi tugas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan; pengelolaan atas Aset daerah yang kurang baik; dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah yang masih lemah atas pengelolaan keuangan daerah, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesalahan, ketidaktertiban, penyimpangan, penyelewengan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem pelaporan keuangan di masa mendatang dan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan langkah-langkah perbaikan, yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari kelemahan-kelemahan di periode-periode sebelumnya; lebih memperhatikan dan menekankan pada unsur-unsur/komponen pengendalian intern; dan memperbaiki sistem pengelolaan atas Aset/barang Daerah.

**Kata Kunci** : Sistem Pelaporan Keuangan, Opini Audit, Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pengelolaan Aset Daerah.





# **Financial Reporting System Implementation of Bengkulu City Government**

**Friesda Rotua Rumondang**

## **ABSTRACT**

This study aimed to determine the factors that led to the Government of Bengkulu City obtain an qualified audit opinion in implementing its financial reporting system for Fiscal Year of 2008.

Based on research that has been done, the factors that led to the Government of Bengkulu City obtain an qualified opinion because of the lack of human resources, where the Government of Bengkulu City does not have human resources with appropriate background in the specification of tasks in financial recording and reporting; the management of unfavorable regional asset, and the Government Internal Control System are still weak on financial management, which resulted in various errors, disorder, irregularities, fraud, and non-compliance with laws and regulations.

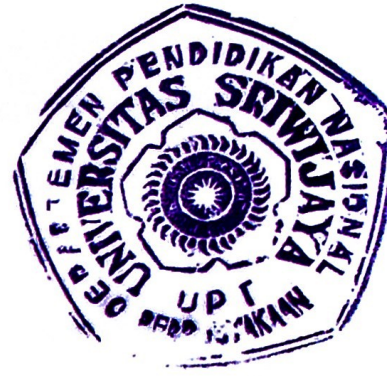
To be able to increase the success in implementing financial reporting systems in the future and can be obtained unqualified audit opinion, the Government of Bengkulu City needs to take steps to repair, with follow up recommendations for improvement of weaknesses in earlier periods; more attention and emphasis on internal controls components, and improve the management system of assets or goods region.

**Keywords** : Financial Reporting System, Audit Opinion, Human Resources, Internal Control, and Management System of Assets



# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah dengan Perpu No. 3 tahun 2005 serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. (Indra Bastian 2007 : 2)

Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (Schiavo-Campo and Tomasi, dikutip dalam Mardiasmo, 2006).

Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif. Pengawasan dilakukan oleh pihak luar eksekutif (dalam hal ini DPRD dan masyarakat); pengendalian, yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen, berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai; sedangkan pemeriksaan (*audit*) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melalui LSM serta organisasi sosial kemasyarakatan di daerah. Perlu dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan, bukan pemeriksaan (*audit*). Pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, yaitu BPK atau BPKP

Terdapat empat opini atas pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI, antara lain: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penilaian atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan atas empat kriteria, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Keempat hal di atas merupakan suatu kriteria pengelolaan keuangan yang harus diterapkan, sehingga LKPD menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara wajar. Di tingkat daerah, dari 293 LKPD tahun 2008 yang diperiksa BPK, 8 diberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 217 wajar dengan pengecualian (WDP), 21 tidak wajar (TW), dan 47 disclaimer atau tidak memberikan pendapat (TMP).

Sebagaimana pemerintah daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Kota Bengkulu telah mengimplementasikan suatu sistem pelaporan keuangan dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik. Audit BPK atas LKPD Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 telah selesai dilakukan. Dari hasil penelusuran ke website BPKRI, ternyata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Artinya masih ada penggunaan keuangan negara yang bersifat material menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perusahaan di sektor swasta, opini auditor independen wajar dengan pengecualian merupakan opini yang menunjukkan kinerja manajemen kurang baik, tidak menutup kemungkinan manajemen akan diganti, atau jika tidak manajemen tidak akan diberikan bonus. Berbeda halnya dengan pemimpin daerah, karena proses



penggantian pemimpin daerah lebih banyak disebabkan oleh berlalunya waktu dan unsur politik. Jika masyarakat ke depan semakin kritis, tidak menutup kemungkinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan pemimpin daerah selain selain indikator-indikator yang bersifat makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi yang terkendali, kesempatan kerja yang semakin meningkat, pengangguran semakin berkurang, keamanan yang kondusif dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Berkenaan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya, dengan judul **“Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit WDP dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya ?
2. Langkah-langkah seperti apakah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Bengkulu untuk meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya di masa mendatang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit WDP dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya.
- b. Untuk memberi masukan/solusi mengenai langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya di masa mendatang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi sistem pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya.

### **1.5 Metodologi Penelitian**

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam analisis permasalahan dapat berjalan dengan baik, maka pembahasan hanya dibatasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan

Supomo, 1999 : 147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan topik yang diteliti.

### **1.5.3.2 Sumber Data**

Kedua jenis data di atas dikumpulkan dari dua sumber, yaitu :

#### **a. Penelitian Lapangan**

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang memerlukan kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### **b. Dokumentasi**

Sumber data berupa dokumen bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan oleh objek yang diteliti.

### **1.5.3.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendukung analisis penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Tindakan atau langkah yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan tentang informasi yang dibutuhkan untuk membantu dalam melakukan analisis dan pembahasan berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara langsung, yaitu melalui tanya jawab dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu dan staf lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.

## 2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Data yang diperoleh berupa dokumentasi yang selama ini digunakan yang berkaitan dengan hasil audit, pencatatan dan pelaporan keuangan.

### 1.5.4 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, maka diperlukan suatu analisis dalam penelitian ini. Dari data yang diperoleh dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif menggunakan data yang dihasilkan dari penelitian dengan memberikan gambaran apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian data tersebut dievaluasi untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi. Dari evaluasi tersebut, penulis berusaha memberikan pemecahan dari permasalahan penelitian yang ditemukan.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah pokok pemikiran yang melandasi permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.



Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun anggaran 2008.

## **1.5.2 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 1 Bengkulu.

## **1.5.3 Data dan Metode Pengambilan Data**

### **1.5.3.1 Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:146), Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam hal ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu dan pihak-pihak lain yang berkompeten di bidangnya.

#### **b. Data Sekunder**

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nur Indriantoro dan Bambang

## **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori dasar yang relevan, yang berasal dari pustaka yang memuat teori, proporsi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan implementasi sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah

## **Bab III DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi atau gambaran umum objek yang akan diteliti yang mana dalam penelitian kali ini yang menjadi objek penelitiannya ialah Pemerintah Kota Bengkulu.

## **Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya yang diolah dari data hasil wawancara. Selain itu juga akan dibahas mengenai langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu lebih meningkatkan keberhasilan dalam pelaporan keuangan di masa mendatang.

## **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang akan menjadi bab terakhir dalam skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan atas permasalahan serta memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, Fajar. 17 November 2007. "Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas". *Bisnis Indonesia*. Hal. B11.
- Aritonang, Aldiani Sulani dan Firman Syarif. *Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Diambil pada tanggal 28 November 2009 dari <http://akuntansi.usu.ac.id>
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Jakarta : Penerbit Salemba Empat .
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Brodjonegoro, Bambang. *Kabar Buruk dari Otonomi Daerah*. Diambil pada tanggal 28 November 2009 dari <http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/18/04040478/kabar.buruk.dari.otonomi.daerah>
- Budiartha, Ketut. *Menelusuri Opini Auditor Independen Atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali*. Diambil pada tanggal 28 November 2009 dari [www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/.../ok%20budiartha.pdf](http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/.../ok%20budiartha.pdf)
- Darmawan, Bambang T. 2009. *Mengendalikan Pengelolaan Aset/Barang Daerah*. Diambil pada tanggal 5 Maret 2010 dari <http://auditortrk.blogspot.com/2009/02/mengendalikan-pengelolaan-asetbarang.html>
- Gade, Muhammad. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 2002. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kuntadi, Cris. *Peranan BPK dalam Audit Sektor Publik Atas Pemerintah Daerah*. Diambil pada tanggal 5 Maret 2010 dari <http://criskuntadi.blogspot.com/2008/11/peranan-bpk-ri-dalam-audit-sektor.html>
- Latifah, Lyna. *Faktor Keprilakuan Organisasi dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Diambil pada tanggal 29 November 2009 dari <https://info.perbanasinstitute.ac.id/pdf/ASPP/ASPP13.pdf>.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1, 1-17
- Nugraha, Eva P. 2009. *Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK*. Diambil pada tanggal 5 Maret 2010 dari <http://evaputranugraha.wordpress.com/2009/11/11/mendapatkan-opini-wajar-tanpa-pengecualian-atas-audit-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-dari-bpk/>
- Nugroho, Nurfajri Budi. *Kualitas Laporan Keuangan Pemda Meningkatkan*. Diambil pada tanggal 28 November 2009 dari <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/11/04/20/272361/kualitas-laporan-keuangan-pemda-meningkat>
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta



- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Simamora, Martin. *Samarinda : SIMDA Agar Laporan Keuangan Selaras Dengan Standar Akuntansi Pemerintah*. Diambil pada tanggal 15 Desember 2009 dari [http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3047:samarinda-simda-agar-laporan-keuangan-selaras-dengan-standar-akuntansi-pemerintah&catid=43:beritadaerah&Itemid=59](http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3047:samarinda-simda-agar-laporan-keuangan-selaras-dengan-standar-akuntansi-pemerintah&catid=43:beritadaerah&Itemid=59)
- Tanjung, Abdul H. 2008. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Diambil pada tanggal 2 Februari 2010 dari [http://www3.hafiz-konsultan.com/artikel/file\\_artikel/Sistem%20Akuntansi%20Keuangan%20Daerah.pdf](http://www3.hafiz-konsultan.com/artikel/file_artikel/Sistem%20Akuntansi%20Keuangan%20Daerah.pdf)
- Tim Pengembang Aplikasi SIMDA BPKP Pusat. 2007. *Pedoman Pengoperasian Aplikasi Penatausahaan Keuangan*. Jakarta : BPKP.
- Triyulianto, Toni. 2008. "Bersama Kita Bisa Menyongsong Masa Depan BPKP yang Lebih Cerah". *Buletin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan*. Vol. 1, No 4, 4-6.